

PROCEEDING

26 Maret 2022

SEMINAR NASIONAL

"Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis"



Dipublikasikan Online Pada:
Pattimura Proceeding:
Conference of Science and
Technology

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DPD HIMPUNAN ALUMNI IPB MALUKU

“Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis”

Ambon, 26 Maret 2022

Diterbitkan oleh Universitas Pattimura
@Hak Cipta dilindungi Undang-undang

e-ISSN: 2829-3770

DOI issue: <https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2022.HAIPBMAL>

Dipublikasikan online pada:

Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology

Terindeks oleh:



November 2022

Tim Prosiding

Editor:

Dr. Ir. Welem Waileruny, M.Si (Ketua)
Dr. Pieter Agusthinus Riupassa, S.Si M.Si (Wakil Ketua)
Dr. Risyart Alberth Far-Far, S.P M.Si (Anggota)
Marlin Chrisye Wattimena, S.Pi M.Si (Anggota)
Yopi Andry Lesnussa, S.Si M.Si (Anggota)

Design Cover:

Taufan Talib, S.Pd M.Si
Ukuran: 29,7 x 21 cm

Reviewer:

1. Dr. Ir. George S. J. Tomatala, M.Si
2. Dr. Ir. Delly D. P. Matratty, M.Si
3. Dr. Ir. Welem Waileruny, M.Si
4. Dr. Ir. Betsy J. Pattiasina, M.Si
5. Dr. Ir. Christoffol Leiwakabessy, M.Si
6. Dr. Vita N. Lawalata, S.P M.Si
7. Dr. Debby V. Pattimahu, S.Hut M.Si
8. Dr. Marthina Tjoa, S. Hut, MP

Keterangan Gambar Latar Cover:

Foto “Jembatan Merah Putih” – sebuah ikon infrastruktur Kota Ambon sebagai beranda masuk-keluar Provinsi Maluku, tampak foto dari udara diambil dari arah Timur jembatan. Pembangunan jembatan ini digagas sejak 1995 oleh Karel Alberth Ralahalu, mulai dibangun 17 Juli 2011, dan diresmikan oleh Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo pada tanggal 4 April 2016, dengan APBN senilai Rp.779,2 miliar. Adalah jembatan yang melintas arah Selatan-Utara menghubungkan Desa Galala di Kecamatan Sirimau ke Desa Poka di Kecamatan Teluk Ambon, sepanjang 1.140 m dan lebar 22,5 m. Kapal dengan tinggi kurang dari 34 m dapat melintas di bawahnya. Jembatan ini telah menyingkat waktu tempuh dari Pusat Kota Ambon ke Bandara Internasional Pattimura di Laha, hanya kurang dari 30 menit. Termasuk, memudahkan akses ke Kampus Poka Universitas Pattimura di Jl. dr Johannes Leimena, dan akses ke RSUP dr Johannes Leimena di Jl. Mr. Chr. Soplanit, serta terutama akses ke Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat di Kabupaten Maluku Tengah.

Kata Pengantar

Prosiding ini disusun berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL yang bertemakan **Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis** yang dilaksanakan Tanggal 26 Maret 2022, di Hotel Manise, Ambon. Penyelenggaraan seminar dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang konstruktif bagi pemerintah dan pelaku kepentingan lain sebagai upaya pencapaian tujuan Pembangunan Nasional sesuai Tema. Pemikiran-pemikiran ilmiah dalam seminar ini dijamin dari para peneliti, penyuluh serta pengalaman pelaku utama dan pelaku usaha.

Tujuan seminar ini perlu dibingkai dengan modal kemitraan di antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pikiran dan pengalaman dari pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan menuju Keamanan dan Kedaulatan Pangan di Indonesia terlebih khusus di Maluku berbasis bisnis.

Kegiatan Seminar Nasional diikuti peserta yang terdiri atas pakar, peneliti, penyuluh, perguruan tinggi, Pemerintah Daerah dan praktisi di bidang Pertanian maupun Perikanan.

Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada Gubernur Maluku yang telah memberikan arahan dan pandangan terkait dengan pentingnya kedaulatan dan keamanan pangan khususnya di Provinsi Maluku. Penghargaan dan terima kasih juga kepada para narasumber istimewa kepada Prof. Dr. Ir. Arif Satria selaku Rektor IPB yang memberi pembobotan tentang pengembangan agromaritim di Provinsi Maluku di era otonomisasi dan juga kepada Dr. Ir. Audy Joinaldy, SPt, MSc, MM, IPM, ASEAN Eng atas paparannya tentang membangun bisnis di wilayah kepulauan. Juga kepada Prof. Dr. Ir. Debby Selano. M.Sc atas paparannya terkait dengan pengembangan perikanan di Provinsi Maluku dalam menunjang keamanan dan kedaulatan pangan.

Selanjutnya kepada para penulis dan editor serta pelaksana seminar nasional ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas hasil penelitian dan pemikiran, sejak seminar hingga tersusunnya prosiding, semuanya berlangsung dengan baik.

Akhir kata, semoga prosiding ini bermanfaat khususnya dalam mensukseskan Program Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku. Bilamana dijumpai ada kekurangan dalam naskah ini, sudilah kami dapat dimaklumi, untuk menjadi catatan perbaikan mendatang.

Ambon, Nopember 2022

DPD Himpunan Alumni IPB Maluku

Dr. Ir. G.S.J. Tomatala, M.Si (Ketua)

Kepanitiaan Seminar Nasional DPD HA IPB Maluku

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 04/SK/DPD.Mal/HA IPB/I/2022
Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA RAKER DAN SEMINAR
NASIONAL/WEBINAR TAHUN 2022

Pengurus DPD HA IPB Maluku

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyusun program kerja DPD HA IPB Maluku Tahun 2022 perlu dilakukan melalui RAKER.
2. Bahwa DPD HA IPB Maluku berkewajiban membangun jejaring bersama pemerintah dan stakeholder lain dalam menjawab berbagai permasalahan di masyarakat sekaligus memberikan kontribusi pemecahannya melalui pandangan Ilmu Pengetahuan yang pelaksanaannya melalui Seminar Nasional atau Webinar seiring dengan pelaksanaan RAKER Tahun 2022.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 perlu mengangkat Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan.
4. Bahwa Panitia dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan pengurus Harian DPD HA IPB Maluku.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Himpunan Alumni IPB
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Alumni IPB
3. Surat Keputusan DPP HA IPB No 77/SK/DPP HA IPB/X/2021 tentang pengangkatan Pengurus Daerah HA IPB Maluku Periode 2021-2025.
- Memperhatikan Hasil rapat-rapat pengurus terbatas dan pengurus lengkap DPD HA IPB Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Keputusan Ketua DPD HA IPB Maluku Nomor: 04/SK/DPD.Mal/HA IPB/I/22 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana RAKER DPD HA IPB Maluku dan Seminar Nasional/Webinar Tahun 2022

KEDUA

Struktur Panitia sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon pada Tanggal 31 Januari 2022

Dewan Pengurus Daerah
HA IPB Maluku

Dr. Ir. G. S. J Tomatala, M.Si

K e t u a

Dr. Ir. W. Waileruny, M.Si

S e k r e t a r i s

Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA RAKER DAN SEMINAR
NASIONAL/WEBINAR TAHUN 2022

Dewan Pengarah : 1. Dr. Ir. G.S.J Tomatala, M.Si (Ketua DPD HA. IPB Maluku)
2. Dr. Ir. W. Waileruny (Sekretaris DPD HA. IPB Maluku)

Ketua Dr. Debby V. Pattimahu, S.Hut, MSi
Wakil Ketua Dr. Ir. Christoffol Leiwakabessy, MSi
Sekretaris Dr. Marlyn C. Wattimena, SPi, M.Si
Wakil Sekretaris Dr. Ir. Rosniyati Suwarda, MSi
Bendahara Dr. Marthina Tjoa, S.Hut, MP

SEKSI-SEKSI

Seksi Acara 1. Dr. Ir. Delly D. P. Matrubby, MSi Ketua
2. Dr. Adrien Jems A. Unitly, S.Si. M.Si Anggota
3. Dr. Ir. Inta Damanik, MSi
4. Dr. Ir. Yolanda M. T. N. Apituley, MAppSc
5. Stani R. Siahainenia, SPi, MSi
6. Yamres Pakniany, S.Th, MSi
7. Selfi Sangadji, SPi, MSi

Seksi Sekretariat & Komunikasi (IT), Dokumentasi 1. Dr. Pieter A. Riupassa, SSi, MSi Ketua
2. Ir. J. Parera, MSi. Anggota
3. Dr. Ir. Edizon Jambormias, MSi
4. Dr. Ir. Dionisius Bawole, M.Si
5. Rajab, S.Pt. MSi
6. Frederik W. Ayal. S.Pi, M.Si

Seksi Usaha Dana 1. Dr. Ir. Rein E. Senewe, MP Ketua
2. Dr. Izaak T Matitaputty, SE, MSi Anggota
3. Dr. Ir. Cindy R.M. Loppies, M.Si
4. Dr. Ir. Venda J Pical, M.Si
5. Dr. Jusmi D. Putuhena, S.Hut, M.Si.
6. Dr. Vita Lawalatta, SP, MSi
7. Aryanto Boreel, S.Hut, M.Si
8. Marchiavel Moniharapon, S.Pt. M.Si
9. Dr. Stephen F.W. Thenu, SP. MSi.

Seksi Perlengkapan, Akomodasi, Transportasi 1. Dr. Risyart A. Far Far, SP, MSi Ketua
2. Dr. Ir. Raja B.D Sormin, M.Si Anggota
3. Christian Pattipeilohy, SPi, MSi
4. Dr. Paulus M. Putileihalat, SP, M.Si.
5. Dr. Herman Siruru, S.Hut, MSc
6. Dr. Ir. Frederika S. Pello, M.Si

Seksi Konsumsi

- | | |
|--|---------|
| 1. Wunuhalono H.E.D. Dahoklory, SPi, MSi | Ketua |
| 2. Dr. Anneke Pesik, S.P. M.Si | Anggota |
| 3. Ir. G.H Augustyn, M.Si | |
| 4. Ir. R. Bremer, M.Si | |
| 5. Ir. Meity L. Hehanussa, MSi. | |
| 6. Dr. Ir. Betty Sahetapy, MP | |
| 7. Novianty C Tuhumury, S.Pi, M.Si | |

Ditetapkan di Ambon pada Tanggal 31 Januari 2022

Dewan Pengurus Daerah

HA IPB Maluku

Dr. Ir. G.S.J Tomatala, M.Si
K e t u a

Dr. Ir. W. Waileruny, M.Si
S e k r e t a r i s

Daftar Isi

	Halaman
Cover	i
Tim Prosiding	ii
Kata Pengantar	iii
Kepanitiaaan Seminar Nasional DPD HA IPB Maluku	iv
Daftar Isi	vii
GENDER DAN KETAHANAN PANGAN PADA MASYARAKAT PESISIR KOTA AMBON Venda Jolanda Pical, Dortje L. Y. Lopulalan	1
HEMATOLOGI IKAN NILA (<i>Oreochromis niloticus</i>) DARI WADUK OLIGOTROFIK DAN EUTROFIK Diana Arfiati, Rizky Kusma Pratiwi, Zakiyyah Nur Inayah	8
PENGARUH PKG SERASAH KAMPUS UNPATTI DAN LIMBAH PERTANIAN TERHADAP FISIKO-KIMIA TANAH DAN HASIL JAGUNG (<i>Zea mays</i>L.) DI ULTISOL Maimuna La Habi, Muhammad Riadh Uluputty, Aminudin Umasangaji	12
KAJIAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI PISANG TONGKA LANGIT DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU Marlita H. Makaruku, Anna Y. Wattimena, Vilma L. Tanasale, Jeanne I. Nendissa	23
IDENTIFIKASI JENIS GULMA PADA AREAL PERTANAMAN KELAPA DI DESA HATIVE BESAR Vilma L. Tanasale, Nureny Goo, Marlita H. Makaruku, Anna Yuliana Wattimena	28
KARAKTER MORFOLOGI TIGA KLON UBI JALAR DI MALUKU Anna Y. Wattimena, Reny Tomaso, Marlita H. Makaruku, Vilma L. Tanasale, Martha Amba	36
MORFOMETRIK LAMUN <i>Cymodocea rotundata</i> DI PESISIR PANTAI TANJUNG TIRAM, POKA, TELUK AMBON DALAM Jessico Hendrick Sermatang	41
KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN KOTA AMBON: DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN PESISIR TELUK AMBON DAN KERENTANANNYA TERHADAP BAHAYA TERKAIT DENGAN KENAIKAN MUKA LAUT Wahyu Budi Setyawan, Wempi Barends, Ahmad Ainarwowan, Dominggus Polnaya	50
SISTEM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU (KASUS PANGAN LOKAL ENBAL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA) Risyard Alberth Far Far, Lydia Maria Ivakdalam, George S. J. Tomatala	63
PERAN MASYARAKAT DESA DALAM MELESTARIKAN HUTAN DI NEGERI SAUNULU KECAMATAN TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH Nova S Tuwael, Jusmy D. Putuhena, B. B. Seipalla	75
PENANGKAPAN TUNA MADIDIHANG (<i>THUNNUS ALBACARES</i>) DENGAN PANCING ULUR OLEH NELAYAN KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH Stany R Siahainenia, Ruslan Tawari, Haruna, Jacobus Paillin, Rifan Dikromo	84

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI POLA KONSUMSI IKAN RUMAH TANGGA NELAYAN DI KABUPATEN BURU SELATAN	92
Rahma Amaliyah Borut, Yolanda M. T. N Apituley, Johanis Hiariey, Dionisius Bawole	
EKSPLOITASI CUMI-CUMI DI PERAIRAN SELATAN PULAU AMBON	99
Welem Waileruny, Ketswin Pattirousamal, Delly D. P. Matratty, Anthonius Sakliresi	
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MANGROVE BERKELANJUTAN DI DUSUN MASIKA JAYA	109
Debby V. Pattimahu, Fanny. Soselissa, Terezia V. Pattimahu	
DETERMINAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI KEUANGAN PELAKU UMKM DI KOTA AMBON	114
Restia Christianty, Teddy Christianto Leasiwal	
MODAL SOSIAL DAN KEBERLANJUTAN PEMANFAATAN LAHAN HUTAN UNTUK PENGELOLAAN DUSUNG	119
Marthina Tjoa, George S. J. Tomatala, Iskar	
KUALITAS MANUSIA MENUJU SATU ABAD GEREJA PROTESTAN MALUKU	124
Johny Christian Ruhlessin	
KESADARAN LITERASI DIGITAL: PELUANG, TANTANGAN DAN KERENTANANNYA BAGI KOMUNITAS LAUT-PULAU (Suatu Pemikiran)	135
Pieter Agusthinus Riupassa, Anneke Pesik	

KUALITAS MANUSIA MENUJU SATU ABAD GEREJA PROTESTAN MALUKU

Human Resources Towards One Century of the Protestant Church of Maluku

Johny Christian Ruhuessin

Program Studi Agama dan Kebangsaan, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Maluku,
Jl. Ot Pattimaipauw, Ambon, Indonesia, 97115

*E-mail: jchruhuessin@gmail.com | DOI: <https://doi.org/10.30598/PattimuraSci.2022.HAIPBMAL.124-134>

Abstrak. Pembaharuan gereja menuntut agar pelayanan gereja harus memengaruhi manusia sebagai subjek bergereja. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pikiran bagaimana korelasi antara kualitas manusia dengan perencanaan pelayanan Gereja Protestan Maluku (GPM) menjelang Satu Abad GPM di tahun 2035. Perencanaan pelayanan gereja menjadi bermutu, relevan dan kontekstual, dan dapat dilaksanakan, hanya ketika gereja mempersiapkan kualitas manusia secara baik dan berkualitas. Gereja Protestan Maluku menjelang Satu Abad, perlu terus adaptif membenahi dan mengevaluasi dirinya, meningkatkan kualitas secara pro-aktif, dalam menghadapi berbagai tantangan geografis, tantangan lingkungan serta kecenderungan perubahan dan perkembangan sosial, kemasyarakatan, dan agama-agama. Dimensi kualitas manusia, berkorelasi baik dengan perencanaan pelayanan, maupun dengan tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi, tetapi juga dengan hakikat gereja sebagai organisasi keagamaan. Oleh karenanya, penting untuk memetakan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi menjelang satu abad perencanaan pelayanan GPM. Pemetaan masalah ini harus dengan tujuan mencapai idealisme dengan tetap realistis, sebagai bentuk *growth mindset* GPM, bertumbuh dalam iman. Sekurangnya GPM harus memerhatikan masalah-masalah yang sekiranya menjadi refleksi bersama, sebagai bagian dari perencanaan pelayanan yang berdaya guna bagi kualitas manusia GPM, yakni: isu kehidupan beragama, perbaikan kualitas demokrasi, penataan perencanaan yang selaras dengan penguatan sdm, serta tiga tantangan serius bergereja yaitu disrupsi, ekologis, dan emosi. Dengan demikian GPM berefleksi atas perjalanan Satu Abad keterpanggilan GPM di Bumi Maluku-Maluku Utara

Kata kunci: kualitas manusia, satu abad GPM, tantangan GPM

Abstract. Church renewal needs that the ministry of the church must influence human beings as subjects of the church. This paper aims to provide thoughts on how the correlation between human quality and service planning for the Protestant Church of Maluku (GPM) approaches the One Century of GPM in 2035. Church service planning becomes quality, relevant and contextual, and can be implemented, only when the church prepares the church's human resources properly and quality. The Protestant Church of Maluku approaching one century needs to continuously improve and evaluate itself adaptively, improve its quality pro-actively, in facing various geographical challenges, environmental challenges as well as trends in social, community, and religious change and development. The dimension of human quality correlates well with service planning, as well as with the challenges and problems faced, but also with the nature of the church as a religious organization. Therefore, it is important to map the problems that are being and will be faced in the approach of a century of planning for GPM services. Mapping this problem must be with the aim of achieving idealism while remaining realistic, as a form of GPM growth mindset, growing in faith. At least GPM must pay attention to issues that may become collective reflection, as part of effective service planning for the human quality of GPM, namely: issues of religious life, improvement of the quality of democracy, arrangement of planning in harmony with strengthening human resources, and three serious challenges church is disruption, ecology, and emotion. Thus GPM reflects on the journey of a century of calling for GPM on the land of Maluku and North Maluku.

Keywords: human quality, one century of GPM, challenge of GPM

I. PENDAHULUAN

Perencanaan gereja menuju satu abad Gereja Protestan Maluku (GPM), perlu mendapat respons pikiran yang mendasar dan konstruktif, sebagai bentuk adaptasi terhadap panggilan gereja, dan terhadap dinamika perubahan yang sedang dan akan dihadapi sekarang dan di masa depan, terutama dalam konteks wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berciri kepulauan. Ada dua pikiran yang ingin dikemukakan untuk memperkaya Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan, dalam rangka merumuskan perencanaan Gereja menuju satu abad GPM. **Pertama**. Realitas Sumber Daya Manusia (SDM), kendala atau persoalan yang paling besar yang dihadapi oleh GPM, bahkan Maluku dalam memasuki masa depan, di era globalisasi, era perubahan, menjelang satu abad, adalah kualitas SDM. Tidak hanya kualitas SDM, melainkan terutama kualitas SDM kepulauan. Apakah kualitas itu? Unsur apa yang mesti ada sehingga, kita dapat mengatakan bahwa SDM-nya berkualitas? Menurut hemat Saya, paling sedikit ada tiga hal: 1) SDM berkualitas paling sedikit memenuhi standar persyaratan yang dibutuhkan, yang ditentukan jelang GPM satu abad. Bagaimana pendidikannya, keterampilan atau *skill*-nya, moral-etik-ritualnya, kultur kerjanya, mentalnya, dan seterusnya; 2) SDM berkualitas yang dapat berfungsi atau berperan dengan baik. Terdapat SDM yang telah memiliki pendidikan, tetapi apakah dengan kualitas pendidikan itu ia dapat berfungsi dengan baik? Bagaimana pula kualitas pendidikan itu menghadapi tantangan perubahan dan inovasi teknologi di masa depan? Artinya kualitas pendidikan harus teruji dengan pertumbuhan dan perkembangan perubahan masyarakat, juga perkembangan dan kemajuan gereja sendiri; dan 3) Bila SDM itu sudah memenuhi kebutuhan dan persyaratan menjelang satu abad GPM, ia sudah berfungsi dengan baik, maka yang ketiga, apakah SDM itu awet, tahan banting, tidak cepat kehilangan motivasi, tidak *ngambek*? (Darmaputera 2007).

Pertanyaannya, apakah Gereja sudah betul-betul memetakan eksistensinya, baik potensi dan kualitas SDM jelang satu abad GPM? Pertanyaan ini semakin penting dan mendesak terutama ketika kita memerhatikan realitas Maluku dan Maluku Utara sebagai konteks kepulauan. Sebagai masyarakat yang berciri kepulauan, tentu saja memiliki keunikan, baik itu budaya, sistem kepercayaannya, cara berpikrinya, dan lainnya. Tentu saja, berkorelasi dengan pandangan hidupnya. Sebagai suatu kesatuan pelayanan, GPM menghadapi banyak masalah, seperti disparitas sosial, atau kesenjangan kewilayahan Klasis-klasis dan Jemaat-jemaat, secara geografis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan tingkat adaptasi terhadap perubahan. Masalahnya adalah apakah gereja sudah secara sungguh-sungguh memetakan secara baik, mendasar dan menyeluruh, kekuatan dan kelemahan Pola Induk Pelayanan (PIP) dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP) GPM Dasawarsa I–IV, tahun 1983-2025? Misalnya, apakah kekuatan dan kelemahan dari model perencanaan gereja yang digunakan? Apakah implementasi seluruh proses perencanaan gereja selama ini, telah berdampak pada perubahan yang signifikan dalam kehidupan berjemaat dan masyarakat? Artinya, kita memasuki satu abad GPM, harus dengan secara menyeluruh melakukan evaluasi yang mendasar dan berani untuk melakukan kritik, koreksi dan pembaruan.

Kedua, setelah kita menyadari keadaan kita yang sebenarnya, kita kemudian menentukan sasaran, target dan tujuan. Mau apa GPM, setelah menyadari keadaan sebenarnya, menuju satu abad GPM? Sebagai gereja, GPM mesti punya arah, tujuan dan sasaran yang jelas. Arah, tujuan dan sasaran, semakin lama semakin tinggi dan semakin pasti ke arah Allah. Arah, tujuan dan sasaran GPM adalah masa depan, bukan masa silam, di mana kita sepakat, satu abad GPM, apakah itu masa depan GPM? Ataukah masa depan GPM sebagai gereja, adalah masa depan yang tetap terbuka. Mesti kita sadari dan ingat, bahwa sukses di masa silam, sukses mengimplementasi PIP-RIPP 1983-2025, dapat merupakan sumber kegagalan kita di masa depan satu abad.

Dalam merumuskan atau menentukan sasaran, selalu saja ada dilema, ada persoalan. Apakah seperti yang Bung Karno inginkan: kita akan menggantungkan cita-cita kita setinggi bintang–bintang di langit, atau seperti kata IMF: *kita harus se-realistis mungkin*? Menurut hemat Saya, kedua-duanya benar, namun penekanan Saya lebih pada pernyataan yang pertama. Tentukanlah tujuan itu seambisius mungkin, cita-cita kita mesti setinggi mungkin, visi sejauh mungkin. Memang untuk kebanyakan orang yang mempunyai prinsip tidak ingin gagal, akan menentukan sasaran yang paling *safed*, 100 persen dapat dicapai. Tidak berani dan takut berpikir besar. Ini tentu saja, ada benarnya. Tetapi kalau orang tidak berani berpikir besar, tidak mungkin menghasilkan yang besar. Ada pepatah “*It’s better to fail at doing something, then to succeed in doing nothing*”. Atau meminjam kata-kata seorang misionaris Inggris “*Expect great things from God, attempt great things for God*”. Inilah, sebagai gereja iman kita diuji. Kalau betul-betul kita yakin bahwa tujuan kita itu terarah dan tertuju kepada Allah, atau kita persembahkan bagi kemuliaan Allah, maka kita

harus berani mengharapkan hal-hal besar dari Allah, “*Expect great things from God*”, dan yang tidak kurang pentingnya, berusaha melakukan hal-hal yang sebesar-besarnya bagi Allah. Memang, apabila kita mengukur sesuatu berdasarkan kemampuan kita sendiri, maka kita hanya akan berani memikirkan yang kecil-kecil. Tetapi kalau kita bicara mengenai iman, maka kita bicara mengenai suatu kekuatan yang mengalahkan dunia. Kita berbicara mengenai kekuatan yang mampu dan berani memindahkan gunung. Inilah, perencanaan selalu bernuansa iman, bernuansa etikal. Kalau perencanaan mengabaikan dimensi ini, gereja akan kehilangan maknanya sebagai gereja. Perencanaan apapun yang dilakukan, harus tetap memperkuat esensi dan hakekat gereja.

Satu hal penting yang mesti disadari sehubungan dengan perencanaan gereja adalah gereja sebagai organisasi keagamaan yang memiliki watak atau ciri yang khas, karenanya baik fungsi maupun peran dan kegiatan, serta aturan, prosedur-prosedur, bahkan perencanaan, secara ideal harus dibangun di atas presuposisi spiritual atau teologi (Ruhlessin 2020). Presuposisi teologi itu yang membedakan gereja sebagai suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Gereja secara hakiki bukanlah organisasi, namun gereja mempunyai sisi institusi. Gereja secara sosiologis membutuhkan organisasi atau institusi, ia tidak dapat mengabaikan manifestasi pola-pola institusi. Tetapi secara hakiki gereja bukan institusi, bukan organisasi. Organisasi adalah sebuah realitas sosiologis-kultural, yang dapat dianalisa dan dievaluasi secara sosiologis-kultural. Sebagai yang demikian, organisasi hanyalah “*sarana*”, yang dapat diciptakan secara kreatif dan dinamis, membantu gereja mencapai tujuan, perencanaan, dan misi gereja. Demikianlah, organisasi gereja membutuhkan perencanaan. Sebagai suatu organisasi yang mengasumsikan adanya sistem perencanaan yang mengarahkan organisasi itu mencapai tujuan, maka organisasi itu merupakan sebuah sistem, yang bergerak dalam keseimbangan sistem-sistem yang lain (Ruhlessin 2020).

Sejak awal disebutkan bahwa gereja harus berani berpikir besar. Memang cara berpikir semacam ini, pasti saja ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu pertanyaan yang khusus datang dari mereka (termasuk anggota jemaat dan para pelayan), yang selalu sinis terhadap agama (baca: gereja), bukankah agama (gereja) selalu tidak realistis, membuat orang bermimpi, mengawan-awan, jauh dari dunia kenyataan. Bagi Saya, dapat begitu, tetapi tidak harus begitu. Berani berpikir besar yang Saya kemukakan tadi, bukanlah soal yang realistis dan tidak realistis, tetapi soal sikap mental, sikap batin, sikap rohani, sebagai gereja yang telah mengalami kuasa kemenangan Kristus. Sebagai yang telah menang, bagaimana gereja dapat mengubah, dan mengatasi keadaan. Bagaimana menciptakan tantangan menjadi peluang.

Kita, sebagai gereja memang mesti realistis, tidak hanya hebat dalam meletakkan tujuan dan sasaran, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Mengapa? karena tujuan atau *goals* itu, tidak diterjemahkan dalam perencanaan yang realistis. Oleh karenanya, menuju satu abad GPM, ada tiga hal yang sebaiknya kita lakukan; 1) sadari keadaan di mana pemetaan menjadi sangat penting; 2) tentukan tujuan; dan 3) susun perencanaan, tetapkan dan pilih model perencanaan yang tepat dan realistis.

Jangan kita berpikir, karena Yesus itu Tuhan, Ia maha kuasa, maka Ia bekerja semau-Nya, semuanya akan terjadi, dan pasti semuanya beres. Tidak! Yesus punya visi dan misi yang amat jelas. Yesus juga punya perencanaan yang amat matang, agar visi dan misinya menjadi kenyataan. Punya *timing* dan jadwal yang jelas. Ada saatnya, Ia mengajar murid-murid-Nya dengan kata (secara verbal), ada saatnya secara visual. Kemudian mereka diutus untuk tugas praktik di mana mereka dibiarkan untuk belajar dari kesalahan mereka. Ini terus berlanjut sampai Ia yakin bahwa murid-murid-Nya itu dapat mandiri. Hanya dengan perencanaan yang rapi, tujuan se-ambisius apa pun dapat kita jadikan realistis. Bagaimana kalau tanpa perencanaan? “*If you fail to plan, you plan to fail*”, Apabila gereja gagal membuat perencanaan, gereja telah merencanakan untuk gagal. Untuk menuju satu abad GPM, tentukan tujuan se-ideal mungkin, tetapi sasaran kita se-realistis mungkin. Berjalanlah satu tapak demi satu tapak. *Think big, start small*.

2. METODE PENDEKATAN

Penulisan ini menggunakan metode fenomenologis-deskriptif dengan pendekatan kualitatif dari pengalaman berbasis kesadaran, yang bertujuan menemukan pemahaman dan makna pada korelasi kualitas manusia dan perencanaan pelayanan gereja yang hadir dalam konteks dan tantangan riil. Tulisan ini memberikan pemikiran autokritik, yang muncul dari kontemplasi penulis dalam memboboti pokok pikiran dan menegaskan bahwa perencanaan merupakan sikap sangat penting untuk masa mendatang yang penuh tantangan disruptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isu Kehidupan Beragama

Ada tiga masalah kehidupan beragama yang semakin rumit di masa depan, yaitu: **masalah pertama, spiritualisasi agama:** beragama hanya pada aspek ritualistik, formalistik, kering dan dangkal dari praksis kehidupan; tidak mengalami pertumbuhan iman, rohani yang kuat. David McCrackel dalam bukunya “God”s Emerging Leadership, dalam Eka Darmaputera (2005), mengemukakan abad ke-20, merupakan abad pemulihan, abad kebangkitan kembali –*Renaissance* – gereja, kebangkitan – gereja, terutama ditemukan kembali Kuasa Allah dan Karunia Roh Kudus, setelah sekian lama hilang atau tidak punya dampak atau sengaja diabaikan. Menurut Mc Gracken, yang membuat hilangnya *renaissance* gereja itu, adalah *rutinisme*, *formalisme* dan *verbalisme*. *Rutinisme*, secara sederhana, terjadi ketika gereja secara mekanis menjalankan apa yang rutin. Enggan melakukan terobosan baru. Malas menjajaki rute-rute baru. Orang masuk gereja tiap hari minggu hingga penuh, tapi tanpa penghayatan. *Formalisme*, secara sederhana, sebagai sikap resmi-resmian. Semua harus berjalan sesuai aturan, legalistik, formalistik. Formalisme di mana gereja eksis, tetapi eksis bagaikan “*tugu*”. Kokoh dan menjulang, namun cuma diam, tidak ada inisiatif, tidak ada inovasi. Tak berdaya merespon perubahan. Gereja terjebak dalam peraturan birokratik. *Verbalisme*, Tidak menyatunya kata dan perbuatan. Cuma omongnya doang. Gereja yang terjebak verbalisme adalah gereja yang bicaranya tinggi, melambung, tapi praktiknya tidak ada. Mandul, yang dibicarakan tentang kasih tapi yang ditebar adalah kebencian. Rutinisme, formalisme, dan verbalisme, secara gradual membuat gereja seperti: ”mumi”, kelihatannya hidup, namun mati dalam hakikatnya. Gereja menjadi tidak lebih sebagai sebuah “organisasi” bukan lagi “organisme”. Sekadar sebuah jawatan, bukan lagi sebuah gerakan. Beku, karena kebekuannya. Spontanitas dimatikan, sebab semuanya mesti tertib, dan ketertiban diidentikan dengan keseragaman. Gereja kelihatan bertumbuh, orang terus bertambah dan makin banyak, namun tidak punya dampak apa-apa bagi ke-sekitar-nya. Sebab ia tidak mampu lagi menawarkan apa-apa yang baru. Persekutuan dingin, walaupun gaduh, Seperti kerumunan orang yang menunggu datangnya “kapal perintis”, masuk gereja berdesak-desak, tapi sebetulnya tidak tersentuh secara jiwa dan batin. Ancaman bikrokasi (rutinisme, formalisme dan verbalisme), terjadi sebagai akibat dari cara pandang gereja yang terlalu berat sebelah, yang melihat gereja sebagai organisasi dan bukan “organisme”. Memahami gereja sebagai organisai “sekuler”, dan bukan sebagai organisasi keagamaan yang seharusnya memiliki presuposisi (pra-anggapan) teologis.

Masalah kedua, komodifikasi agama: agama jadi komoditas ekonomi, orang kaya mengasihi dirinya sendiri, agama dan kehidupan beragama kehilangan makna dan relevansi sosial. Kehidupan dan pengalaman hidup beragama, seharusnya bukan karena loyalitas atau fanatisme pasifnya memegang doktrin-doktrin agama yang telah ditetapkan, melainkan bagaimana peran dan keterlibatan aktif, dalam upaya meringankan penderitaan manusia. Sikap dan perilaku orang beragama, tidak kita kagumi karena ziarah spiritualitasnya, tetapi seharusnya karena tindakan kasih yang konkrit yang mesti dipraktikkan dan diimplementasikan dalam pengalaman hidup bersama di tengah realitas sosial. Jadi beragama, mengharuskan kepedulian dan tindakan etis. Kisah “orang samaria yang murah hati”, di dalam cerita Alkitab, memberi inspirasi yang menarik tentang kepedulian etik. Kisah perumpamaan yang berawal dengan sebuah diskusi teologis abstrak, mengenai makna kehidupan kekal ”Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?” Berakhir dengan sebuah tindakan praktis, yang tanpa kata-kata menjelaskan apa artinya menyatukan diri dengan penderitaan manusia. Sekali lagi kisah ini, menegaskan, makna kehidupan beragama yang memiliki basis, terarah pada keprihatinan etis dan sosial.

Masalah ketiga, politisasi agama: Memakai agama sebagai alat politik. Politisasi agama, mengagamakan politik. Politik identitas (basis keagamaan). Ancaman yang sedang dihadapi oleh agama (agama-agama) sekarang ini, adalah secara ideologis, agama berdiri berhadapan-hadapan sebagai suatu kepentingan ideologi dan kepentingan politik. Politik identitas (berbasis agama, etnis) sekarang ini menjadi ancaman serius bagi tegaknya integrasi sosial dan nasional, dalam sebuah proses membangun Indonesia merdeka yang modern, berwawasan nusantara. Politik identitas berbasis agama, dengan sendirinya akan memecah belah bangsa ini. Politik identitas akan merusak reputasi Indonesia, yang telah menjadi teladan dunia dalam toleransi, suku, etnik maupun agama. Kalau mau memajukan agama, apapun agamanya, memajukannya dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan politik. Semua agama maju dan mengalami peradaban yang luar biasa, mengalami masa damai, menghargai kemanusiaan, ketika mereka memajukan agama dengan ilmu pengetahuan. Ketika agama “bersenggama” dengan ambisi-ambisi politik, ambisi kekuasaan, pasti akan mengami ketegangan dan konflik.

Agama yang mencerahkan harus keluar dari ketiga hal itu. Agama harus menjadi *way of life* – jalan hidup; agama sebagai budi pekerti yang luhur, agama sebagai hati nurani yang luhur. Kekristenan yang mencerahkan, artinya harus kembali kepada apa yang Yesus ajarkan (nilai-nilai hidup dan karya Yesus). Agama dan beragama itu harus membahagiakan. Agama itu ada yang terinstitusionalisasi, tetapi jangan sampai kehilangan aspek rohaninya. Rohani itu sangat terkait dengan hati nurani. Hati itu harus mencerahkan. Beragama berbasis hati. Postur beragama GPM menuju satu abad, harus berubah, agama berbasis hati yang mencerahkan, agama perdamaian, agama kemanusiaan, berbasis kebudayaan. Keberagamaan kolektif dalam era kemajemukan, multi-wajah nusantara, tidak boleh kehilangan hati nurani.

Menurut hemat Saya, ada empat hal, agar agama itu mencerahkan. **Pertama, Pendidikan yang mencerahkan dan membebaskan.** Pendidikan, termasuk pendidikan Kristen, merupakan sebuah proses pencerdasan, dan pemanusiaan manusia. Karenanya, pendidikan mesti merupakan usaha sadar dan terencana untuk menumbuhkan suasana edukasi yang sedemikian kontekstual, sehingga peserta didik terinovasi mengembangkan potensi dirinya, termasuk “*potensi ilahi*”, mengembangkan karakter, kepribadian dan perilaku, yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa dan kemanusiaan.

Dalam kerangka, pendidikan berperan dan berfungsi, menumbuhkan kehidupan beragama, yang mencerahkan, sudah saatnya, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Kristen, mendorong dan mengembangkan pendidikan karakter, pendidikan perdamaian atau pun pendidikan multi-kultural. Realitas masyarakat Indonesia berwajah nusantara multi-kultural, berbasis Pancasila ini, rentan terhadap konflik-konflik yang “bernuansa” SARA. Oleh karenanya, dibutuhkan pendidikan karakter, pendidikan perdamaian dan pendidikan multi-kultural. Melalui proses pendidikan karakter, perdamaian, multikultural, baik melalui pendidikan formal, informal maupun non-formal, dapat dibangun dan disosialisasikan nilai-nilai kehidupan beragama yang santun, inklusif, toleran, menumbuh-kembangkan kultur perdamaian dan kesadaran kemajemukan, serta mengembangkan moderasi beragama.

Kedua, beriman dan tidak terjebak spiritualisasi. Semua agama mengajarkan tentang pentingnya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal yang dimiliki oleh semua agama; nilai-nilai keadilan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai hormat dan penghargaan kepada kemanusiaan, dan seterusnya. Bagaimana mengembangkan kehidupan beragama (dan beriman) yang peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang dialami oleh seluruh umat manusia; kemiskinan, keterbelakangan, masalah-masalah lingkungan, bencana alam, kekerasan, konflik, dan lainnya. Bagaimana agama yang berkorelasi dengan praksis kehidupan, memperjuangkan *common good*, berbuat baik, untuk semua manusia dan ciptaan Allah lainnya.

Ketiga, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak boleh menjadi menara gading. Ilmu pengetahuan seharusnya mengabdikan kepada kemanusiaan, “*Sciences as a vocation*”. Artinya pendidikan Kristen harus dapat mendemonstrasikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, memberi penguatan pada persoalan etika dan moral. Saya mengutip apa yang dikatakan Willi Toisuta, antara lain mengatakan “Ketrampilan abad ke 21, yang akan dikuasai oleh para siswa antara lain: *using technology, understanding science, having global awareness, and most important: having the ability to keep learning*. Dalam konteks demikian, *having global awareness* juga mengisyaratkan pengembangan kemampuan berpartisipasi dengan menawarkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat inklusif yang demokratis dan beradab, bertanggung jawab dan sensitif terhadap keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Gereja dan lembaga-lembaga pendidikannya memerlukan *mindset* yang baru, kematangan profesional dan kemampuan keuangan, agar tidak hanya berseru tetapi terlibat dalam mendatangkan pembaharuan pendidikan sebagai suatu panggilan masa depan yang pasti.

Keempat, penguatan moral dan etika. Bagaimana kita membangun keluarga di tengah era *lebay*, era *galau*, era medsos, era kekerasan. Keluarga termasuk keluarga Kristen, adalah basis kehidupan sosial terkecil di dalam masyarakat. Kalau keluarga tangguh, masyarakat dan bangsa pun akan tangguh. Masalahnya, bagaimana membangun dan memperkuat basis ketahanan moral dan etika di dalam keluarga. Memperkuat keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, di tengah kekerasan di dalam keluarga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Retaknya keluarga sebagai akibat pandemik, banyak yang diberhentikan kerja. Dampak medsos di era digital, telah merubah relasi-relasi sosial, termasuk keluarga yang semulanya sangat personal menjadi sangat impersonal. Perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan ketidakmampuan mengendalikan emosi, dan lainnya. Bagaimana juga, perlu penguatan etika dan moral, serta membangun etika kesabaran dalam keluarga, untuk membentengi derasnya turbulensi perubahan dalam keluarga sebagai basis inti kehidupan sosial yang terkecil. Keluarga harus benar-benar

dibina dan dipersiapkan dengan ketahanan moral dan etika yang kuat, bila kita ingin mendapatkan kualitas masyarakat dan bangsa yang bermutu.

Agama mesti berfungsi sebagai kekuatan moral etik, dan kekuatan integrasi kebangsaan. Bilamana agama direduksi sebagai instrumen politik dan ekonomi, maka agama tidak lagi mengembangkan fungsinya sebagai penjaga moral dan etika kebangsaan, penjaga moral-etik, *peace building*.

Sekarang ini dan diperkirakan di masa depan, kita sedang menghadapi ancaman konservatisme, bahkan konservatisme yang radikal, di mana masing-masing agama memiliki konservatisme. Dan ada banyak orang beragama jadi korban konservatisme. Sepanjang kehidupan bersama sebagai bangsa, kesepakatannya adalah Negara Pancasila, Tuhan bagi kita sama; *Universal God* (tentunya saja masing-masing agama dengan namanya). Kalau kita bicara tentang agama dari benar salah, maka kalau kita benar orang lain pasti salah. Kalau kita benar yang lain pasti "kafir". Tetapi kalau kita bicara dari perspektif etika. Maka semua agama punya sistem etika. Soal bagaimana beragama dari sistem etika ini, harus kita populerkan. Jadi kita tidak hanya berbicara soal agama pada basis legalistis (*fixed mindset*). Kemajuan peradaban, kehidupan beragama suatu bangsa diukur dari tradisi beretika bangsa itu sendiri. Apalagi kalau tradisi etika itu kita letakan pada budaya kita (sebut saja: *pela gandong*, *ain ni ain*, *kidabela*, dan lainnya).

Cara pandang *fixed mindset*, cara pandang dengan ciri-ciri statis, mapan, eksklusif, tertutup, arogan, *conflict building*; sedangkan cara pandang *growth mindset*, cara pandang yang terbuka, inovasi perubahan, inklusif, pluralistik, *peace building*. Bagaimana kita dapat mendorong terbangunnya *growth mindset*, kita perlu pendidikan dan transformasi, pendidikan (formal, non-formal, informal).

3.2 Perbaiki Kualitas Berdemokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik suatu negara telah diakui keampuhannya oleh banyak negara. Demokrasi tidak saja merupakan bentuk *final* dan sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi juga merupakan doktrin politik luhur yang diyakini kebanyakan negara. Demokrasi diyakini memiliki akar sejarah yang panjang, dan karenanya, ia telah teruji di dalam sejarah sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik untuk menjamin, lingkungan politik suatu Negara yang stabil. Misalnya, tahun 1992 seorang pemikir politik Amerika Serikat, Francis Fukuyama, menulis karyanya yang terkenal, *The End of History and The Last Man* (1992). Dalam karyanya itu, dalam jurnalnya yang berjudul: *The End of History*, yang dimuat di *Nastional Interest* (1989). Tesisnya, bahwa demokrasi liberal telah menjadi pemberhentian terakhir umat manusia dalam perjalanan mencari ideologi, dan demokrasi liberal merupakan bentuk terakhir (paling ideal) dari sistem politik-pemerintahan umat manusia. Salah satu faktor, mengapa Fukuyama merumuskan tesis tersebut, sangat berkaitan dengan berakhirnya perang dingin yang telah mendobrak *status quo*, pertempuran ideologi komunisme dan liberalisme saat itu. Menurut Fukuyama, runtuhnya tembok Berlin tahun 1989, menandai kemenangan demokrasi liberal sehingga ideologi universal yang menjejek pikiran manusia saat ini. Uni Soviet yang menjadi simbol negara komunisme dunia pun hancur menjadi pecahan negara merdeka dan berdaulat. Sistem politik negara-negara dunia kemudian menunjukkan gejala perubahan menjadi demokrasi liberal.

Masalahnya kemudian, adalah bagaimana praktik berdemokrasi itu sendiri pada taraf implementasi praksisnya. Apakah tetap ampuh? Atau mengalami kemunduran? Faktor apa saja yang mengakibatkan kemundurannya? Kalau merujuk pada tesis Fukuyama, menurutnya, pada mulanya, tahun 1790 hanya ada tiga negara penganut demokrasi liberal. Hingga tahun 1990, Negara penganut demokrasi liberal telah bertambah sebanyak 58 menjadi 61 negara. Dari data, memperlihatkan bahwa beberapa negara yang berubah menjadi demokrasi liberal berasal dari Negara-Negara di benua Amerika, yaitu Amerika, Kanada, Chili, Argentina, Brazil, Uruguay, Ekuador, Meksiko, Kosta Rika, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Peru, Ekuador, El Savador, Nikaragua, Honduras, Jamaika, Trinidad dan Republik Dominika (Doile 1983).

Sejak saat itu, demokrasi liberal memasuki masa kejayaannya, dan menjadi *lastman standing* dalam kemelut pertempuran ideologi dan sistem politik pemerintahan dunia. Demokrasi liberal dianggap menjadi sistem paling ideal di mana kesetaraan, kebebasan dan hak-hak individu dilindungi oleh kekuasaan negara yang menerapkan sistem *check and balances*. Sejarah umat manusia dianggap telah berakhir karena tidak ada lagi evolusi pemikiran yang menginginkan tujuan lain selain demokrasi liberal.

Namun ternyata, idealisme sistem politik pemerintahan demokrasi liberal tampak menimbulkan keraguan pada praktiknya. Hal itu dilihat dan disadari sendiri oleh Fukuyama. Ia melihat bagaimana negara supremasi hukum dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi liberal yang berdiri, berkembang pada

akhirnya rusak dan mengalami kemunduran. Ironisnya, gejala kemunduran demokrasi liberal malah terjadi di Negara yang dianggap paling stabil sistemnya, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Padahal kedua negara tersebut menjalani sistem demokrasi liberal pada awal-awal *trend* sistem tersebut diterapkan di berbagai negara. Amerika Serikat tahun 1790 dan Inggris tahun 1848, sebagaimana dicatat oleh Michael Doll (1983). Hal itu diakui sendiri oleh Fukuyama, saat menulis buku terbarunya *Identity: the Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (2018).

Fukuyama menulis buku ini, karena dua alasan, yaitu (1) Donald Trump tidak terpilih jadi Presiden pada November 2016, dan yang ke (2) Keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa (Brexit). *The End of History* (buku I), menyoroti bagaimana perjalanan ideologi manusia telah mencapai satu titik akhir, yaitu sebuah sistem demokrasi liberal. Sedangkan *Identity* (buku ke-II), ditulis untuk melihat ternyata sistem paling akhir dianggap paling paripurna tersebut punya ancaman baru. Fukuyama sebetulnya hanya berusaha memikirkan kembali bagaimana kejayaan demokrasi, ternyata punya ancaman dari upaya perjuangan pengakuan identitas kelompok-kelompok masyarakat. Fukuyama melihat bahwa, bukan berarti demokrasi liberal mengalami keruntuhan dan dihantui sistem yang baru. Fukuyama masih tetap kukuh bahwa sistem demokrasi liberal adalah sistem akhir yang dapat memuaskan semua pihak. Sayangnya dalam praktiknya sistem tersebut tidak benar-benar berjalan dengan baik.

Dari catatan Fukuyama, ancaman dan tantangan yang ikut memuluskan jalan bagi kemunduran demokrasi liberal, antara lain adalah kesadaran tentang identitas (politik identitas). Identitas menjadi isu yang terus diperjuangkan di era yang mana kebebasan diberikan kepada setiap orang. Setiap orang merasa berhak bahwa identitasnya diakui dan dihormati di masyarakat. Akibatnya manakala identitas-identitas yang muncul, saling bertentangan dan mengancam satu sama lain, dan kemudian Negara tidak hadir untuk mengatasinya, maka akan mengakibatkan pertentangan, bahkan konflik di dalam masyarakat. Hal itu, misalnya dengan terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika, yang sempat mengusung politik identitas (anti imigran). Dan juga peristiwa Brexit, di mana Inggris mulai tidak hormat lagi dengan identitas bersama sebagai sebuah kawasan Eropa.

Pengalaman Amerika Serikat dan Inggris, dalam studi Fukuyama, tentu saja, mesti menyadarkan Indonesia, dengan konteks masyarakat multi wajah Nusantara. Bahwa ancaman politik identitas, adalah ancaman yang serius. Ancaman dan kemunduran sistem politik, pemerintahan demokrasi Pancasila adalah sesuatu yang sedang kita hadapi. Saya sangat pastikan, ini tantangan masa depan sistem politik pemerintahan Indonesia. Sebut saja beberapa contoh, untuk tidak memnyebutkan semua, munculnya diskursus-diskursus politik menjelang pemilihan Presiden dengan mengusung tema-tema atau isu-isu, kelompok dekat ulama. Gerakan-gerakan akar rumput dengan demo-demo anti dan pro-Cina, anti dan pro-Arab, bela dan anti-Khilafah, bela Islam, bela minoritas, bela Ahok, bela Anies. Kita boleh berbeda soal intepretasi tentang isu-isu ini, entah itu hanya sebuah kepentingan politik. Namun, kebutuhan untuk adanya pengakuan identitas kelompok dalam proses pencatutan politik, tidak terhindarkan. Artinya, setiap kelompok tentu saja merasa memiliki hak untuk dihormati dan diakui. Karenanya pula, maka kesatuan masyarakat menjadi pecah pada tataran kepentingan kelompok, karena memperjuangkan identitas masing-masing, demi penghargaan dan penghormatan identitas, tetapi juga demi hak-hak politik. Tidak mengherankan, kalau “Presiden Joko Widodo, dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan seluruh bangsa ini jelang Pilpres, Pilgub, Pilbup di tahun 2024, untuk hati-hati dengan politik identitas, dan utamakan kesatuan dan persatuan bangsa”.

Tentu saja, peringatan Presiden Jokowi, sangat penting, namun itu saja tidak cukup. Kenyataan Indonesia sebagai sebuah negara dan masyarakat multi wajah nusantara, sebuah masyarakat dan negara plural, memang tidak mudah. Masalahnya, bagaimana Negara mengakomodasi kepentingan semua kelompok, kepentingan identitas secara adil. Mengakui dan mengakomodasi kepentingan satu kelompok saja, sudah pasti akan menimbulkan perlawanan kelompok lain, dan bukan tidak mungkin akan melahirkan kecemburuan sosial dan politik, bahkan politik kebencian. Artinya, bila penanganan Negara terhadap ancaman politik identitas salah, tidak ditangani secara baik, akan menimbulkan politik kebencian, dan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di dalam masyarakat.

Fukuyama, dalam studinya mengusulkan enam poin penting, bagaimana memperkuat identitas nasional untuk mempertahankan tatanan politik, yaitu: 1) Perlunya keamanan fisik, bangsa tidak terpecah-pecah; 2) Identitas nasional penting, bagi kualitas pemerintah (misalnya, tingkat korupsi yang rendah, pelayanan publik yang efektif); 3) Memfasilitasi pembangunan ekonomi (mendorong dan menggairahkan masyarakat untuk bangga terhadap negaranya, masyarakat akan berambisi untuk Negara); 4) Meningkatkan

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Negara (Kepercayaan atas Negara, dan pemerintah) akan mengefektifkan partisipasi politik dan ekonomi masyarakat; 5) Identitas nasional yang penting untuk mempertahankan jaringan pengamanan sosial yang kuat, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi; dan 6) Identitas nasional, memungkinkan demokrasi (liberal) berjalan sebagaimana mestinya.

Ada enam poin yang dikemukakan Fukuyama penting dan perlu dipertimbangkan untuk menolong terbangunnya penguatan identitas nasional di Indonesia. Tentu saja penerapan gagasan yang ditawarkan Fukuyama mesti secara hati-hati mempertimbangkan konteks sosial-politik, keagamaan dan kebudayaan di Indonesia. Saya mengusulkan, pentingnya penguatan identitas nasional (masyarakat multi wajah nusantara - *Bhineka Tunggal Ika*, sebagai kepribadian bangsa kita), dengan memperkuat kebudayaan nasional kita, dengan menghidupkan dan memberdayakan kearifan lokal masyarakat Indonesia, menjadi “kearifan nasional”. Di samping itu, perlu memperkuat kualitas pembangunan demokrasi. Tidak saja demokrasi politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Pembangunan demokrasi kita tidak saja pada aspek proseduralnya saja, tetapi juga demokrasi secara substansial. Penguatan fungsi dan peran lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, penguatan peran dan fungsi DPR, DPD, DPRD kabupaten-kota. Penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, termasuk lembaga-lembaga keagamaan. Penguatan masyarakat sipil bagian kelas menengah yang kuat. Penguatan masyarakat, keluarga, dan sekolah, sebagai media sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Menurut hemat Saya, salah satu perkembangan positif yang sangat penting diapresiasi, dalam pembangunan politik dan pembangunan demokrasi kita adalah peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil serta pengukuran metode baru Indeks Demokrasi Indonesia. Dengan pengukuran metode baru indeks demokrasi Indonesia, maka pertumbuhan demokrasi kita diharapkan semakin baik. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa demokrasi, memiliki 23 indikator, yang meliputi: kebebasan (7 indikator), kesetaraan (7 indikator) dan kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator). Kebebasan di dalam dimensi ekonomi, politik dan sosial. Begitu juga Kesetaraan di dalam dimensi ekonomi, sosial dan politik. Begitu pula, kapasitas lembaga demokrasi, dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik (Depdagri, 2022, Badan Pusat Statistik, 2022).

3.3 Beberapa Isu Strategis dan Tantangan Konteks Masa Depan

Salah satu masalah serius lain yang mesti dilihat oleh GPM sekarang dan menuju satu abad GPM adalah persoalan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan dan hutan serta dampaknya terhadap konflik kepemilikan hak-hak masyarakat adat, secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, serta bagaimana melakukan upaya mediasi masyarakat adat dalam pusran konflik Sumber Daya Alam dan politik kutuk sumber daya. Bagaimana Gereja mengupayakan langkah-langkah advokasi, non-litigasi maupun litigasi. Gereja mesti menjadi kekuatan pertahanan masyarakat adat, untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tugas dan panggilan advokasi, gereja sudah saatnya mengembangkan advokasi gereja berbasis riset.

Berkaitan dengan alih fungsi lahan hutan, hutan adat, tanah, serta dampaknya terhadap konflik kepemilikan hak-hak masyarakat lokal (adat), secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta konflik politik sumber daya alam, yang terjadi di dalam masyarakat lokal/adat, seperti di Seram, Aru, dan lain tempat. Kita perlu etika moral kebijakan publik. Pemahaman etik-moral kebijakan publik, antara lain, bahwa aktor penyebab alih fungsi lahan/hutan bersifat multidimensional, maka dalam pengendalian laju alih fungsi kawasan lahan/hutan tidak cukup hanya dengan pendekatan prinsip teknis dan hukum, namun perlu juga ditempuh pendekatan holistik yaitu, perpaduan antara pendekatan prinsip teknis, hukum dan etika (Anon, 1994). Oding Affandi, dengan mengutip Masher dan Irland, mengatakan bahwa, butir-butir aksi *deep ecology* menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bermakna dan mendalam serta memberikan landasan kuat secara etika moral sebagai landasan mengapa manusia mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi lingkungan hidup, termasuk lahan/hutan. Perlindungan hutan/lahan adalah sebagai upaya perlindungan dirinya. Bumi merupakan *complex adapted system* yang mampu menyesuaikan dirinya dalam menhadapi perubahan, yang diakibatkan manusia (Masher, 1994).

Pemahaman mengenai ekosentrisme dan biosentrisme dirasa penting untuk dijelaskan. Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme (teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri). Sebagai kelanjutan, ekosentrisme sering disamakan begitu saja dengan biosentrisme, karena adanya banyak kesamaan antar kedua teori ini. Kedua teori ini mendobrak cara pandang antroposentrisme (teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semata) yang membatasi keberlakuan etika hanya ada komunitas manusia. Keduanya memperlakukan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas. Pada ekosentrisme, etika

diperluas untuk mencakup komunitas ekologi. Jadi berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan etika pada biosentrisme (pada kehidupan seluruhnya), Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Salah satu versi teori ekosentrisme ini adalah teori etik lingkungan yang sekarang ini populer dikenal sebagai *deep ecology* (DE). Sebagai istilah, *Deep Ecology*, pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naes, seorang filsuf Norwegia, pada (1973), di mana prinsip moral yang dikembangkan adalah menyangkut seluruh komunitas ekologis (Keraf, 2002). Dalam perspektif *deep ecology*, masyarakat memandang keberlangsungan kehidupan dan eksistensi alamnya merupakan kombinasi faktor yang tampak dan tidak tampak. Konsepsi yang sesuai dengan peta aksi *deep ecology*, yaitu pandangan ekologi yang lebih mendalam. Pandangan dan aksi ekologis bertumpu tidak hanya pada gejala biofisik, tetapi mengutamakan etika moral (Suryadharma, 2009)

3.4 Proses Perencanaan

Menuju satu abad GPM, mengisyaratkan pentingnya penataan secara mendasar segenap faktor perencanaan antara lain kelembagaan (meliputi: struktur, kultur, perilaku), faktor SDM (terutama kualitas SDM), perencanaan yang baik mesti ditopang oleh SDM yang berkualitas. Kepemimpinan meliputi, model dan kultur serta karakter kepemimpinan gereja. Kepemimpinan yang mampu memberi arah dan kontribusi bagi perubahan masyarakat. Pengaruh lingkungan strategis, primordial, nasional, regional dan lokal (meliputi antara lain, kebijakan politik negara, realitas kemajemukan agama-agama, realitas kemajemukan gereja gereja, dan lainnya. Kesiapan jemaat-jemaat, pengaruh dan dampak perubahan ekonomi global.

3.5 Tiga Tantangan Serius

Ada tiga isu atau tiga tantangan serius dan fundamental yang dihadapi umat manusia. Tiga isu atau tiga tantangan tersebut adalah: (1) **isu disruptsi**. Disrupsi, merupakan sebuah fenomena, di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar, yang keluar dari tatanan yang lama, dan mengubah sistem yang lama, menjadi sebuah sistem baru. Ciri disruptsi, yaitu perubahan yang massif dan cepat, dengan pola yang sulit ditebak. Perubahan yang cepat mengakibatkan ketidakpastian. Terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan. Sekarang ini kita telah memasuki era masyarakat 4.0 ke 5.0, yang dimaknai dengan tingginya persaingan, di berbagai sektor, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, karena pada masa ini masyarakat dituntut untuk hidup berdampingan dengan teknologi. Disrupsi teknologi akan merubah seluruh tatanan hidup masyarakat, perubahan dalam cara kita hidup. Dengan perubahan yang sangat massif dan sangat cepat, misalnya: akan ada perkembangan di mana, kendaraan misalnya tidak lagi membutuhkan *driver*. Masalahnya kemudian adalah bagaimana dengan tenaga-tenaga kerja manusia yang ada. Pengangguran dan kemiskinan tidak mungkin terhindarkan. Isu atau tantangan yang ke (2) adalah **isu ekologi**. Isu perubahan iklim, banjir tanah longsor, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, erosi dataran pantai, pinggir sungai, tenggelamnya pulau. Isu atau tantangan yang ke (3) adalah **isu emosi**. Sosial media (*hoax*, penyesatan informasi, pembodohan masyarakat). Masyarakat yang terkotak-kotak, konflik di tengah masyarakat, radikalisme berbasis politik identitas agama, suku, dan seterusnya.

4. SIMPULAN

Terhadap seluruh uraian Saya sebagai pertimbangan GPM menuju satu abad, dalam peningkatan Kualitas Manusia GPM, maka Saya menyimpulkan empat hal. **Pertama**, Perencanaan adalah kebutuhan mendasar dari GPM sebagai gereja. Bila GPM ingin tetap menggemakan atau menjalankan misi dan panggilannya, sebagai eksistensi sebagai gereja kepulauan di Maluku dan Maluku Utara. Untuk mewujudkan tujuannya, misinya, dan panggilannya, mesti diterjemahkan dalam perencanaan yang tepat (realitis), pemetaan konteks, keadaan dan tantangan (konteks laut-pulau), serta penetapan tujuan yang dapat dicapai, dengan mempertimbangan realitas SDM yang ada. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, gereja memiliki watak yang khas dan unik, baik fungsi, peranan dan aktivitas, serta perangkat aturan yang dimilikinya. Seluruh perangkat aturan dan organisasi serta perencanaan, tujuan dan misinya, mesti dibangun di atas presuposisi iman atau teologis yang jelas. Presuposisi inilah yang membedakan gereja sebagai suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Presuposisi teologis itulah, yang membedakan mana perencanaan gereja, dan mana perencanaan suatu organisasi sosial atau jawatan. Oleh karena itu,

suatu perencanaan gereja yang baik, bukan hanya karena model perencanaan, tetapi juga apa presuposisi, etik-moral-teologis yang mendasari sebuah model perencanaan gereja (secara sosiologis-kultural), dalam hal ini perencanaan gereja menuju satu abad GPM. Dengan kata lain, sebuah perencanaan gereja, menuju satu abad GPM, adalah dialektika antar dimensi iman (teologi) dan sosiologis-kultural-manajerial.

Kedua, Kehidupan beragama yang menghadapi tantangan-tatangan sekuler seperti spiritualisasi agama, komodifikasi agama, dan politisasi agama, harus dilawan oleh GPM dengan mengatur postur bergereja yang tegap dan laksana, yang berbasis hati dan menecerahkan. GPM menjelang satu abad harus menjadikan keprihatinan akan pendidikan, keimanan yang nyata, perkembangan Ilmu Pengetahuan, serta penguatan Moral Etika, sebagai wujud dari postur bergereja GPM, atau postur beragama untuk menghasilkan kualitas manusia GPM, kualitas manusia beragama yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan kata lain, kalau mau memajukan agama atau kehidupan beragama, agama apa pun, majukan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, moral dan etika. Semua agama pasti akan maju, mengalami perjumpaan, dan masa damai, menghargai kemanusiaan, panggilan untuk membangun peradaban hanya ketika agama-agama memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan dan etika-moral. Sebaiknya, ketika agama berkenalan dengan ambisi politik dan ambisi kekuasaan, politik identitas berbasis (agama dan etnis) sudah pasti kita akan terlibat dalam konflik, pada gilirannya terjadi disintegrasi sosial dan nasional.

Ketiga, Manusia GPM seyogyanya manusia yang memahami realitas, manusia yang inovatif, dan manusia yang takut akan Tuhan. Seluruh bentuk pengiringan realitas menuju arah kehancuran moral-etik dan *conflict building* harus dibentengi, agar tidak merasuk pada jiwa manusia GPM. Kualitas manusia GPM adalah kualitas manusia yang dibentuk oleh gereja dan ditempa dalam semangat nasionalisme sehingga, perjuangan *Founding Father* dalam semangat *Bhineka Tunggal Ika* pada realitas kebangsaan harus diwarnai dengan perjuangan demokrasi. Kualitas demokrasi akan menghasilkan *mindset* etis-moral yang luhur dari manusia GPM, untuk menjaga kesatuan dan persatuan pada relasi kebangsaan Indonesia dan juga Maluku-Maluku Utara yang multikultur, itulah wajah nusantara kita. Kehidupan berdemokrasi selalu berkorelasi dengan etika dan moralitas masyarakat Demokrasi merupakan syarat mutlak bagi partisipasi dan emansipasi rakyat secara politik, sosial dan ekonomi, demi terwujudnya Indonesia merdeka berwawasan nusantara. Upaya demokrasi dapat dilakukan dengan jalan melakukan sosialisasi nilai-nilai demokrasi, melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga keagamaan.

Keempat, Sebagai Gereja dalam ke-Malukuan, yang lahir dari manusia kepulauan, maka basis manusia kepulauan itu juga harus dijaga dan dipelihara untuk menyatakan kasih Allah pada Bumi Kepulauan. Eksploitasi kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat adat, menjadi perhatian juga bagi GPM untuk dilawan sebagai upaya mengembangkan kualitas manusia yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, melainkan melihat seluruh alam ciptaan sebagai bagian dari realitas dirinya, yang patut dijaga dan dipelihara dalam semangat ekosentrisme. Dengan semangat ekosentrisme, ada tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Salah satu versi teori ekosentrisme ini adalah teori etika lingkungan yang dikenal sebagai *deep ecology*, yakni pandangan ekologi tidak hanya pada gejala biofisik, tetapi mengutamakan etika moral. Secara praktikal, Pemerintah seharusnya mempunyai kemauan dan perbuatan politik, merekonstruksi ciri etik-moral kebijakan alih fungsi lahan/hutan dari perilaku pelanggaran aturan alih fungsi lahan/hutan ulayat masyarakat adat/lokal, dari sektor konstruksi kawasan berwajah kekuasaan represif berubah menjadi wajah kesejahteraan, keadilan, perdamaian, hak-hak asasi, serta berimplikasi etik-moral kebijakan publik pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afandi, O. (n.d). Kebijakan Alih Fungsi Hutan: Suatu Analisa Etika Lingkungan dan Kehutanan. Diunduh 04 April 2021, dari https://www.academia.edu/11998922/Kebijakan_Alih_Fungsi_Hutan,_Suatu_Analisa_Etika_Lingkungan_dan_Kehutanan.
- Amin, M. Masyhur dan Nadjib Mohammad (Editor). (1993). Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial. LKPSM. Yogyakarta.
- Anon (1994). GLOSSARY dalam: Agricultural Ethics. Issue for the 21th Century. ASA Specia.
- Darmaputera, E. (2002). Beragama Dengan Akal Sehat. Gloria. Cyber Ministries. Yogyakarta.
- Darmaputera, E. (2005). Kepemimpinan Dalam Perspektif Alkitab. Kairos Books. Yogyakarta.

- Darmaputera, E. (2007). *Tegak, Sebab Didirikan di Atas Batu: Khotbah-khotbah tentang bagaimana Bertahan dalam Iman di Tengah Tantangan*. NPK. Jakarta.
- David E. Apter. (1981). *Introduction to Political Analysis*. New Delhi.
- Troeltsch, E. (1986). *Protestantisme and Progress (The Significance of Protestantism for the Rise of the Modern World)*. Philadelphia.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York. Farrar, Straus and Giroux.
- Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Masher, C. (1994). *Sustainable Forestry; Philosophy, Science and Economic*. St Lucie.
- Midayanti, N. (2022). (Badan Pusat Statistik) Indeks Demokrasi Indonesia, Metode Baru (Disampaikan Pada Koordinasi Peningkatan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil serta Sosialisasi Pengukuran Metode baru IDI) Ambon, 20 September 2022.
- Ruhlessin, J. Ch. (2020). *Struktur Organisasi dan Misi Gereja*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Suryadarma, I. G. (2009). Peran Huatan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Stabilitas Iklim. Satu Kajian Deep Ecology (Kasus Masyarakat Desa Adat Tenganan, Bali) dalam Kurniawan. A dkk. W Sujarwo (Editor) PROSIDING, Seminar, Peranan Konservasi Flora Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Pemanasan Global, Bali 14 Juli 2000. UPR Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, "Eka Larya Bali", LIPPI Press Jakarta. <https://kumparan.com/agaton-kenshanahan-1536243987012/> Francis-fukuyama, dan upaya memikirkan kembali kejayaan Demokrasi Liberal lewat Identitas- 1542727523692630207
- Sutikno, W. (2022) IDI Sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Dalam RPJMD (disampaikan pada Koordinasi Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil serta Sosialisasi Pengukuran Metode Baru IDI), Ambon 20 September 2022.